

## KETERKAITAN SPASIAL KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN SEKTOR UNGGULAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017-2021

Nisa Nurokhati\* dan Mulyo Hendarto Robertus


Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,  
Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

\*Corresponding Email: [nisanurokhati@students.undip.ac.id](mailto:nisanurokhati@students.undip.ac.id)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the spatial linkages between districts/cities based on leading sectors in West Java Province. This study uses the Location Quotient (LQ) analysis method and Spatial Autocorrelation analysis using the Global Moran analysis tool and the Local Indicator of Spatial Autocorrelation (LISA). This study uses secondary data in the form of Gross Regional Domestic Product (GDP) data based on constant prices according to the district/city business field of West Java Province for 2017-2021 sourced from the Badan Pusat Statistik of West Java Province. The results of calculating the LQ index which forms the basis of Global Moran and LISA analysis show that there are three highest leading sectors in West Java, namely the construction sector; government administration sector, defense, and mandatory social security; as well as the education services sector. Based on the results of Global Moran's analysis of the 3 leading sectors, only the government administration, defense, and compulsory social security sectors and the education services sector have significant spatial linkages in West Java. However, the area disturbance is classified as weak because the Moran index value is away from the value (+1). The results of the Local Indicator of Spatial Autocorrelation (LISA) analysis show cluster patterns and High-High (Hot-Spot) interplay in the defense administration, defense, and mandatory social security sectors in Ciamis Regency and the education services sector in Ciamis Regency, Majalengka Regency, and Kuningan Regency. The limitation of this research is that Global Moran and LISA analyses only use a significance test of  $\alpha = 5\%$  so the interpretation of inter-regency/city linkages is still lacking in detail.*

*Keywords: Leading Sector, Spatial Linkage, Location Quotient, Global Moran, and LISA.*

 <https://doi.org/10.14710/djoe.39537>



[This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license](#)

### PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif dalam rangka mencapai kesejahteraan. Todaro (2000) mengatakan pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar yang diharapkan dapat menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik secara material

maupun spiritual dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan sebagai cerminan kenaikan seluruh nilai tambah yang tercipta di suatu wilayah (Pratiwi & Kuncoro, 2016).

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang menyumbang PDRB nomor tiga tertinggi mencapai 13.01% setelah DKI Jakarta (17.18%) dan Jawa Timur (14.48%) pada tahun 2021. Disamping capaian kontribusi PDRB pada tingkat nasional yang tinggi ternyata Jawa Barat mempunyai capaian indikator sosial ekonomi antar kabupaten/kota yang kurang baik. Tingkat ketimpangan pembangunan di Jawa Barat diindikasikan dengan angka indeks *Williamson* sebesar 0,66.

Tabel 1. Indeks *Williamson* Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

Tahun	Indeks <i>Williamson</i>	Klasifikasi Angka Ketimpangan
2017	0,66218	Tinggi
2018	0,66397	Tinggi
2019	0,66000	Tinggi
2020	0,64225	Tinggi
2021	0,66784	Tinggi

Sumber: BPS Jabar, diolah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 ditetapkan 6 wilayah pengembangan yang merupakan kawasan strategis pengembangan wilayah diantaranya adalah Bodebekpunjur, Purwasuka, Ciayumajakuning, Priangan Timur-Pangandaran, Sukabumi, dan KK Cekungan Bandung. Tujuan terbentuknya Wilayah Pengembangan (WP) tersebut kawasan antar daerah kabupaten/kota ini adalah agar daerah dalam satu kawasan saling bekerjasama dan berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pemerataan pembangunan. Namun menurut Noviyanti, dkk (2020) kerjasama antar daerah dalam rangka mengembangkan potensi, daya saing dan pemerataan pembangunan itu sejauh ini masih belum optimal. Tingkat perkembangan wilayah dan perekonomian masih didominasi WP Bodebekpunjur dan KK Cekungan Bandung dan hanya berpengaruh pada pusat, efek pembangunan ekonominya belum sampai pada hinterland. Apalagi sebagian forum kerjasama tersebut hanya berhenti di MoU, diantara kabupaten/kota belum menemukan kata sepakat bagaimana bersinergi dalam kerjasama tersebut.

Halidun, dkk (2019), kerjasama regional belum maksimal karena kurangnya keterlibatan kajian sektor potensial yang benar-benar signifikan sesuai dengan pola keruangan dalam dasar pembuatan kebijakan. Kuncoro (2004) kebijakan pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah hendaknya memprioritaskan sektor unggulan yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota dengan tetap memperhatikan secara proporsional sektor lainnya sesuai dengan potensi dan peluang pengembangannya. Rustiadi, dkk (2009) menambahkan strategi kerjasama regional sebaiknya didasarkan pada keunggulan kompetitif sektoral yang sudah benar-benar diidentifikasi terlebih dahulu dan kemudian menjadi subjek ukuran promosi.

Selain memperhatikan sektor yang benar-benar unggulan pembentukan kerjasama regional juga harus mengakomodasikan keadaan struktur ruang dengan pendekatan geografi (Riyadi & Baratakusumah, 2003). Tarigan (2003) bahwa dalam konteks ilmu bumi ekonomi (*economic geography*) pola terjadinya adalah dengan

adanya aktivitas ekonomi yang dapat menunjukkan keberadaan suatu kegiatan di suatu lokasi dan bagaimana wilayah sekitarnya beraksi atas kegiatan tersebut dan gejala-gejala dari suatu kegiatan yang bersangkutan paut dengan tempat atau lokasi sehingga ditemukan prinsip-prinsip penggunaan ruang yang berlaku. Selanjutnya, pendekatan spasial (keruangan) menjadi salah satu faktor kajian dalam pendekatan geografi dengan berdasarkan faktor tertentu, misalnya faktor perbedaan lokasi (Bintarto, 1989).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diperlukan kajian khusus mengenai keterkaitan spasial antar wilayah di Jawa Barat berdasarkan sektor unggulannya. Hal ini dikarenakan sektor unggulan merupakan faktor penggerak (*prime mover*) pertumbuhan ekonomi wilayah. Hasil kajian keterkaitan ini akan memperlihatkan pola spasial yang menunjukkan hubungan korelasi antar wilayah kabupaten/kota menurut sektor unggulannya. Sehingga dapat terlihat kabupaten/kota mana saja yang memiliki korelasi spasial berdasarkan sektor unggulannya yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan dasar pertimbangan proses pembangunan Jawa Barat untuk ke depannya, khususnya dalam upaya membangun keterkaitan antar wilayahnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Pusat Pertumbuhan Wilayah (*Growth Poles*)

Dalam teorinya, Francois Perroux (1950) mengatakan bahwa pertumbuhan suatu wilayah tidak terjadi di sembarang tempat melainkan di titik-titik tertentu yang membentuk konsentrasi kegiatan ekonomi. Pada awalnya Perroux mendefinisikan kutub pertumbuhan sebagai suatu kumpulan industri di wilayah tertentu yang membentuk sebuah pusat pertumbuhan dan wilayah pendukungnya (Sjafrizal, 2018). Perroux menambahkan tentang adanya konsentrasi kegiatan industri pada wilayah tertentu dapat mendorong terjadinya peningkatan efisiensi kegiatan ekonomi yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Richardson (1978) menambahkan tentang empat karakteristik utama sebuah pusat pertumbuhan wilayah antara lain (a) adanya sekelompok kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu; (b) konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional atau paling kurang daerah sekitarnya secara dinamis; (c) adanya keterkaitan yang erat dari segi input-output antara sesama kegiatan ekonomi di dalam wilayah tersebut; (d) terdapat industri induk (*propulsive industry*) yang dapat berfungsi sebagai industri hulu atau penyedia bahan baku dan industri hilir atau pengguna hasil produksi (Sjafrizal, 2018).

Menurut Albert O. Hirschman penerapan konsep *growth pole* akan menimbulkan daya tarik yang kuat dalam menciptakan konsentrasi pembangunan ekonomi (aglomerasi) di sekitar wilayah pembangunan bermula kemudian diikuti oleh trickling down effect yang akan menciptakan berbagai peluang ekonomi sehingga pada saat tertentu akan tercipta distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata (Sukirno, 2007).

### Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi (*economic base theory*) mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut (Tarigan, 2014). Dalam penjelasan lain Arsyad (1999)

menambahkan penentu pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah akan berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar wilayah. Selanjutnya pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal seperti tenaga kerja dan bahan mentah untuk ekspor meningkatkan pendapatan lokal dan menciptakan lapangan kerja. Menurut Richardson (Tarigan, 2014) mengatakan suatu wilayah harus mampu membuat sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung dengan cara mensinergikan sektor-sektor basis utamanya dan sektor-sektor non basis sebagai pendukungnya.

Menurut Glasson (1997) konsep dasar basis ekonomi membagi perekonomian menjadi dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis adalah sektor-sektor yang mengekspor atau memasarkan barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sektor non-basis adalah sektor yang menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang hidup dalam batas-batas ekonomi masyarakat tersebut.

### **Keterkaitan Spasial**

Menurut Bintarto (1983) interaksi adalah kontak atau hubungan antara dua wilayah atau lebih dan menimbulkan suatu kenyataan yang baru dalam wujud tertentu. Interaksi yang terjadi antar wilayah dapat berupa interaksi di bidang ekonomi. Sebagai contoh adanya aliran barang dan jasa ataupun migrasi tenaga kerja. Adanya interaksi spasial akan menyebabkan terjadinya keterkaitan spasial. Keterkaitan ini dipresentasikan dengan nilai observasi pada wilayah tertentu dipengaruhi oleh nilai observasi pada wilayah lain. Keterkaitan spasial merupakan hubungan yang terjadi karena adanya interaksi antar wilayah. Besarnya keterkaitan antar wilayah dapat berbeda-beda tergantung dari intensitas dan kualitas interaksinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah letak suatu wilayah terhadap wilayah lain (tetangga).

Keterkaitan spasial mengacu pada keterkaitan data spasial dalam lingkup ruang yang membentuk 3 pola spasial, yaitu pola cluster, pola dispersed dan pola random. Pola random, yaitu beberapa daerah terletak secara acak di beberapa lokasi dan posisi suatu daerah tidak dipengaruhi oleh posisi daerah lainnya; pola dispersed, yaitu setiap daerah berada secara merata dan berjauhan dengan daerah-daerah lainnya dan; pola cluster, yaitu beberapa daerah membentuk suatu kelompok dan saling berdekatan dengan daerah lainnya. Pola cluster terbentuk saat keterkaitan spasial yang terbentuk adalah positif dan pola dispersed terbentuk saat keterkaitan bernilai negatif (Anselin, 1999).

## Teori Kerja Sama Antar Daerah

Kerja sama antar daerah adalah suatu kerangka hubungan kerja yang dilakukan oleh dua atau lebih dalam posisi setingkat dan seimbang untuk mencapai tujuan Bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat (Pamudji, 1985). Menurut Patterson dalam Warsono (2009) mendefinisikan kerjasama antar daerah (intergovernmental cooperation) adalah “an arrangement two or more goverments for accomplishing common goals, providing a service or solving a mutual problem”. Dari definisi tersebut tercermin adanya kepentingan bersama yang mendorong dua atau lebih pmda untuk memberikan pelayanan atau memecahkan masalah bersama.

Sebuah kerja sama mempunyai tiga unsur pokok yang harus ada yaitu dua pihak atau lebih, interaksi, dan tujuan Bersama. Unsur dua pihak atau lebih menggambarkan suatu himpunan kepentingan yang saling mempengaruhi sehingga terjadi interaksi untuk mewujudkan tujuan Bersama. Kerjasama menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi seimbang, selaras, dan serasi, karena interaksi yang terjadi bertujuan demi pemenuhan kepentingan bersama tanpa ada yang dirugikan (Pamudji, 1985). Akib, dkk (2009) mengatakan isu-isu yang berakitan dengan kerjasama atar Pemerintah Daerah antara lain isu pemekaran daerah, peningkatan peran provinsi, pengurangan kemiskinan serta pengurangan disparitas wilayah. Dalam rangkat pengurangan kemiskinan dan disparitas wilayah yang disebabkan keterbatasan kemampuan dan sumber daya yang berbeda-beda tiap daerah dapat diatasi dengan kerja sama dalam bidang perdagangan. Kerjasama antar daerah dalam bidang perdagangan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam penggunaan sumber daya alam secara optimal sehingga menciptakan pengembangan ekonomi wilayah.

## METODE PENELITIAN

### Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis Location Quotient adalah penentuan sektor unggulan pada suatu wilayah dengan menunjukkan suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu wilayah terhadap besarnya peranan sektor tersebut di wilayah yang lebih besar (Tarigan, 2014). Untuk mengetahui suatu sektor dikategorikan menjadi sektor sektor unggulan (basis) atau sektor non-basis dapat dilakukan perhitungan LQ sebagai berikut:

$$LQ_i = \frac{(E_{ij}/E_j)}{(E_{it}/E_t)} \quad (1)$$

$E_{ij}$  : Nilai kontribusi sektor i di kabupaten/kota

$E_j$  : Total PDRB kabupaten/kota j

$E_{it}$  : Nilai kontribusi sektor i di Provinsi Jawa Barat

$E_t$  : Total nilai PDRB seluruh sektor di Provinsi Jawa Barat

Hasil penghitungan LQ menghasilkan tiga kriteria yaitu:

LQ >1: artinya sektor tersebut tergolong sektor basis atau menjadi sumber pertumbuhan, sektor memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak hanya memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri namun juga dapat diekspor ke luar wilayahnya.

LQ=1: artinya sektor tersebut tergolong sektor non-basis, tidak memiliki keunggulan komparatif. Produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri atau tidak mampu direkspor.

LQ<1: artinya sector tersebut termasuk sektor non-basis. Produksi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri sehingga perlu impor dari luar wilayah.

Analisis *Location Quotient* dalam penelitian ini menggunakan data PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010 dari rentang waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Kemudian hasil analisis ini dihitung akumulasi rata-rata sehingga diperoleh tiga sektor unggulan tertinggi.

### **Analisis *Spatial Autocorrelation***

Analisis *Spatial Autocorrelation* adalah analisis yang dilakukan dengan pendekatan keruangan dengan memperhatikan korelasi variabel dengan dirinya sendiri berdasarkan letak geografis (Lee dan Wong, 2001). Analisis *Spatial Autokorelation* dilakukan dengan dua metode analisis yaitu analisis *Global Moran* dan analisis *Local Moran* (LISA).

### **Analisis *Global Moran***

Indeks moran adalah sebuah uji statistik yang bertujuan untuk melihat nilai autokorelasi spasial, yang mana digunakan untuk mengidentifikasi suatu lokasi dari pengelompokan spasial atau autokorelasi spasial. Nilai koefisien Global Moran ini dihitung secara statistik dengan menggunakan persamaan matematis berikut:

$$I = \frac{n}{\sum_i \sum_j w_{ij}} \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} (x_j - \bar{x})(x_i - \bar{x})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \quad (2)$$

di mana

$I$  : Indeks Moran

$n$  : jumlah variable amatan, dalam analisis ini akan menggunakan *polygon* spasial kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

$w_{ij}$  : matriks bobot interaksi spasial antar *polygon* kabupaten/kota I dan *polygon* kabupaten /kota j

$x_i$  : nilai koefisien LQ sector basis di kabupaten i

$x_j$  : nilai koefisien LQ sector basis di kabupaten j

$\bar{x}$  : nilai rata-rata dari x

Secara umum apabila nilai indeks moran mendekati 1 maka mengindikasikan adanya *cluster* dan ketika nilai indeks moran mendekati 0 maka mengindikasikan penyebaran. Statistik moran memiliki ekspektasi E(I) adalah nilai ekspektasi dari I yang dirumuskan sebagai berikut (Lee dan Wong, 2001):

$$E(I) = \frac{-1}{n-1} \quad (3)$$

Uji Hipotesis Global Moran

H0: Tidak ada autokorelasi spasial antar amatan

H1: Terdapat autokorelasi spasial antar amatan

dengan kriteria pengambilan keputusan H<sub>0</sub> ditolak apabila |Z-value| > Z<sub>(1-α)</sub>. atau p-value < (α) = 0,05.



### **Analisis *Local Indicator of Spatial Autocorrelation* (LISA)**

LISA mengidentifikasi bagaimana hubungan antara suatu lokasi pengamatan terhadap lokasi pengamatan yang lainnya. Anselin (1999) menyatakan bahwa LISA untuk setiap pengamatan harus memenuhi 2 syarat yaitu nilai-nilai yang sama dan jumlah LISA untuk semua pengamatan sebanding dengan gabungan keseluruhan spasial.

Lokal Moran dapat mengidentifikasi pemusatan pada nilai tinggi dan rendah dan mengindikasikan pola-pola apa saja dari hubungan spasial dapat memberikan kontribusi untuk hasil dari statistik autokorelasi spasial secara lebih detail. dan memvisualisasikan pengamatan yang berbeda. Hal ini merupakan kelemahan yang utama dari statistic autokorelasi global yang hanya dapat mengindikasikan proses *cluster* secara menyeluruh. Bagaimanapun juga scatterplot tidak mengindikasikan signifikansi.

Statistik lokal Moran sama dengan LISAdan dirumuskan sebagai berikut:

$$I_i = \frac{(x_i - \bar{x})}{m_o} \sum_j w_{ij} (x_j - \bar{x}) \quad (4)$$

Dengan  $n$  merupakan banyaknya wilayah pada suatu daerah amatan,  $x_i$  merupakan nilai atribut untuk wilayah  $i$ ,  $\bar{x}$  adalah rata-rata untuk nilai atribut dari wilayah  $n$ , dan  $w_{ij}$  adalah matriks spasial terbobot. Hasil dari statistik lokal Moran dapat diklasifikasikan kedalam empat jenis asosiasi spasial dan divisualisasikan lewat peta *cluster* LISA (Anselin, 1999).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis *Location Quotient***

Metode *Locatio Quotient* adalah salah satu teknik pengukuran yang paling terkenal dari model basis ekonomi untuk menentukan sektor basis dan non-basis. Sektor basis merupakan sektor-sektor yang mempunyai nilai  $LQ > 1$  sedangkan sektor bukan basis adalah sektor-sektor yang mempunyai nilai  $LQ < 1$ .

Hasil perhitungan dengan metode LQ menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 tidak mengalami perubahan yang berarti. Nilai indeks LQ di setiap kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat cenderung tetap, artinya tidak banyak sektor yang mengalami perubahan dari sektor basis ke sektor non-basis demikian pula sebaliknya. Hal ini menandakan bahwa pembangunan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tidak banyak mengalami perubahan.

Dalam analisis ini dilakukan penentuan sektor potensial untuk dijadikan bidang kerjasama regional. Hasil akumulasi tujuh belas sektor dalam dalam PDRB tahun 2017 sampai dengan 2021, terdapat tiga sektor yang memiliki akumulasi terbanyak di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat yaitu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebagai indeks sektor wajib terbanyak, kemudian diikuti oleh sektor Jasa Pendidikan dan diurutan ketiga adalah sektor Konstruksi. Secara lebih lengkap berikut ini dapat dijelaskan hasil analisis LQ untuk tiga sektor tertinggi tersebut.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebanyak 14 kabupaten dari 18 kabupaten dan 7 kota dari 9 kota yang ada di Provinsi Jawa Barat disepanjang tahun penelitian memiliki nilai Indeks  $LQ > 1$ . Kabupaten tersebut terdiri dari Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung,

Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran dan 7 kota dari 9 kota yang ada di Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar.

Hasil analisis LQ untuk Sektor Jasa Pendidikan menunjukkan bahwa terdapat 13 kabupaten dari 18 kabupaten yang ada dan 6 kota dari 9 kota yang ada di Provinsi Jawa Barat memiliki nilai Indeks LQ > 1. Tigas belas kabupaten tersebut antara lain yaitu: Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran. Sedangkan enam kota yang memiliki sektor basis di Sektor Jasa Pendidikan antara lain Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Banjar.

Hasil analisis LQ pada sektor Konstruksi menunjukkan terdapat 10 kabupaten dari 18 kabupaten yang ada dan 8 kota dari 9 kota yang ada di Provinsi Jawa Barat memiliki indeks basis di sepanjang penelitian ini. Sepuluh kabupaten tersebut antar lain Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran. Delapan kota tersebut antara lain Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar.

### ***Analisis Spatial Autocorrelation***

Analisis keterkaitan dan pola spasial ini dilakukan terhadap tiga sektor unggulan yang paling banyak menjadi sektor basis di semua kabupaten/kota dan di sepanjang tahun penelitian. Pemilihan tiga sektor utama ini diharapkan bisa menjadi sektor yang berpotensi untuk membentuk pola kerjasama regional antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat. Hasil analisis keterkaitan ini berupa nilai Indeks Moran pada tiga sektor unggulan tersebut.

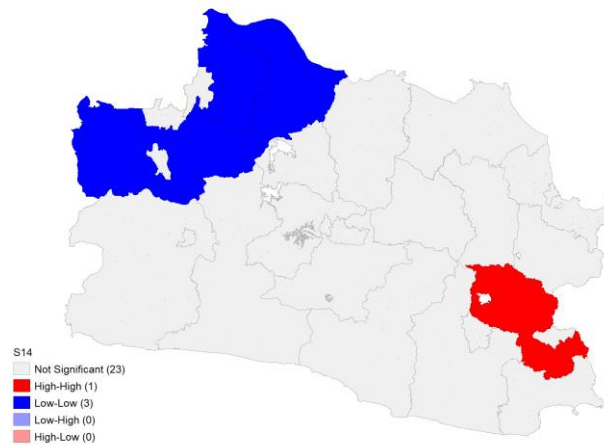
Secara umum nilai Indeks Moran pada tiga sektor unggulan tertinggi di Jawa Barat menunjukkan tingkat kekuatan keterkaitan spasial yang masih sangat rendah, hal ini berpotensi memiliki pola spasial yang acak. Artinya antar kabupaten/kota yang berdekatan kurang memiliki pengaruh antara satu sama lain. Kekuatan keterkaitan wilayah yang paling tinggi dimiliki oleh sektor Jasa Pendidikan dengan nilai Indeks Moran sebesar 0,382. Walaupun masih tergolong kecil (jauh dari +1) indeks ini memiliki potensi pola spasial yang menggerombol (*clustered*). Artinya sektor Jasa Pendidikan di wilayah kabupaten/kota yang berdekatan di Provinsi Jawa Barat masih saling memberi pengaruh satu sama lain. Secara lebih lengkap berikut ini dijelaskan pola keterkaitan spasial di masing-masing tiga sektor unggulan tersebut.

### **Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib**

Bedasarkan output diagram *randomization* GEODA menunjukkan nilai pseudo p-value = 0,03 <  $\alpha$  = 0,05 dan nilai Z-value = 2,473 >  $Z_{1-\alpha} = 1,64$ , yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan terdapat autokorelasi spasial antar



kabupaten/kota di Jawa Barat pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib.



Gambar 1. LISA Cluster Map Sektor Jasa Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

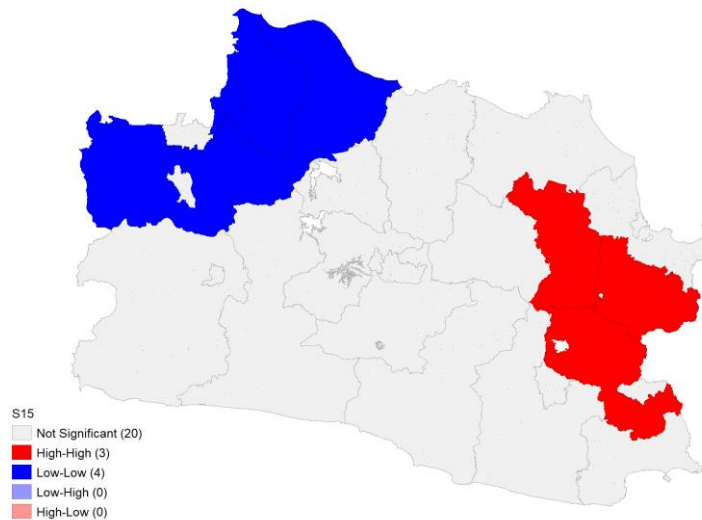
Sumber: Data olah, 2023

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bogor memiliki indeks LISA yang lebih rendah dari rata-rata nilai bobot LQ pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib di provinsi Jawa Barat (*Low-Low*) dan masuk ke dalam kluster *Cold Spot*. Sehingga pemerintah perlu menyusun ulang strategi dan perencanaan dalam upaya meningkatkan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Sedangkan Kabupaten Ciamis memiliki indeks LISA yang lebih tinggi dari rata-rata nilai bobot LQ pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib di provinsi Jawa Barat (*High-High*) dan termasuk kluster *Hot Spot*. Sehingga pemerintah perlu melakukan upaya untuk mempertahankannya.

### Sektor Jasa Pendidikan

Bedasarkan output diagram *randomization* GEODA menunjukkan nilai pseudo p-value =  $0,03 < \alpha = 0,05$  dan nilai Z-value =  $2,473 > Z_{(1-\alpha)} = 1,64$ , yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan terdapat autokorelasi spasial antar kabupaten/kota di Jawa Barat pada sektor Jasa Pendidikan”.

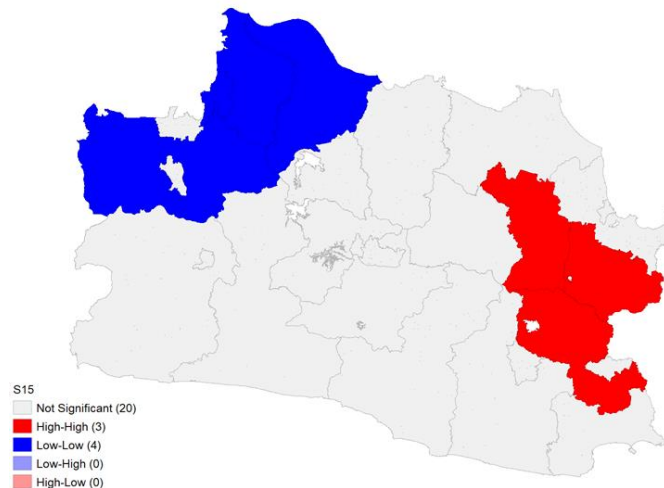
Berdasarkan Gambar 2, dapat dilihat bahwa Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, dan Kota Bekasi memiliki indeks LISA yang lebih rendah dari rata-rata nilai bobot LQ pada sektor Jasa Pendidikan di provinsi Jawa Barat (*Low-Low*) dan masuk ke dalam kluster *Cold Spot*. Sehingga pemerintah perlu menyusun ulang strategi dan perencanaan dalam upaya meningkatkan sektor Jasa Pendidikan. Sedangkan Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan memiliki indeks LISA yang lebih tinggi dari rata-rata nilai bobot LQ pada sektor Jasa Pendidikan di provinsi Jawa Barat (*High-High*) dan termasuk kluster *Hot Spot*. Sehingga pemerintah perlu melakukan upaya untuk mempertahankannya.



Gambar 2. LISA Cluster Map Sektor Jasa Pendidikan  
Sumber: Data olah, 2023

### Sektor Konstruksi

Bedasarkan output diagram *randomization* GEODA menunjukkan nilai pseudo p-value =  $0,03 < \alpha = 0,05$  dan nilai Z-value =  $2,473 > Z_{(1-\alpha)} = 1,64$ , yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan terdapat autokorelasi spasial antar kabupaten/kota di Jawa Barat pada sektor Jasa Konstruksi”.



Gambar 3. LISA Cluster Map Sektor Konstruksi  
Sumber: Data olah, 2023

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang memiliki indeks LISA yang lebih rendah dari rata-rata nilai bobot LQ pada sektor Konstruksi di provinsi Jawa Barat (*Low-Low*) dan masuk ke dalam kluster

*Cold Spot*. Sehingga pemerintah perlu menyusun ulang strategi dan perencanaan dalam upaya meningkatkan sektor Konstruksi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan dan hasil analisis, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Semua kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki sektor unggulan dalam struktur perekonomiannya. Meski sangat variatif, namun ada beberapa sektor yang dominan dimiliki oleh kabupaten/kota di Jawa Barat yaitu sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; dan sektor konstruksi.
2. Berdasarkan hasil analisis Global Moran pada 3 sektor unggulan hanya sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib serta sektor jasa pendidikan yang memiliki keterkaitan spasial dan signifikan di Jawa Barat. Meskipun keterkaitan wilayahnya terolong lemah karena nilai indeks moran menjauhi nilai (+1).
3. Adapun hasil analisis *Local Indicator of Spatial Autocorrelation* (LISA) menunjukkan pola cluster (berkelompok) dan saling mempengaruhi High-High (Hot-Spot) pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib di Kabupaten Ciamis dan sektor jasa Pendidikan di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2014). *Pertumbuhan wilayah dan wilayah pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi konsep implementasi kebijakan: Perspektif, model, dan kriteria pengukurannya. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Alwi, M., Karismawan, P., & Paranata, A. (2020). Identifikasi interaksi ekonomi sektoral antara Kota Mataram sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan kabupaten yang ada di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1).
- Anselin, L. (1999). *Spatial econometrics*. Dallas: University of Texas. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-015-7799-1>
- Aprianoor, P., & Muktiali, M. (2015). Kajian ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Teknik PWK*, 4(4).
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Camara, G., Moteiro, A. M., Fucks, S. D., & Carvalho, N. S. (2004). *Spatial analysis and GIS: A primer*. International Post Graduate Course on Geographic Information Technologies.
- Fauzi, M. R., Rustiadi, E., & Mulatsih, S. (2019). Ketimpangan, pola spasial, dan kinerja pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*, 3(3).
- Fikri, M. T., & Fafurida. (2017). Sektor unggulan dan keterkaitan spasial ekonomi antar kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 7(3).
- Glasson, J. (1997). *Pengantar perencanaan regional*. Jakarta: LPFE UI.

- Griffith, D. A., & Paelinc, J. P. (2011). *Non-standard spatial statistics and spatial econometrics*. Berlin: Springer Berlin-Heidelberg.
- Halidun, L. A., & Ihsan, A. R. (2019). Keterkaitan spasial antarwilayah berdasarkan potensi ekonomi (Studi kasus: Kawasan Mamminasata). *Jurnal Wilayah dan Kota Maritim*, 7.
- Hamzah, L. M., & Chayyani, N. R. (2020). Ketimpangan dan autokorelasi spasial pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(2).
- Islam, et al. (2009). Economic growth analysis of six divisions of Bangladesh using location quotient and shift-share method. *Bangladesh Research Publications Journal*, 12(2).
- Kuncoro, M. (2004). *Metode kuantitatif: Teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Lee, J., & Wong, S. W. D. (2001). *Statistical analysis with ArcView GIS*. John Wiley & Sons.
- Lembo, A. J. (2006). Spatial autocorrelation. Cornell University.
- Longley, P. A., et al. (2005). *Geographic information system and science*. Department of Geography, University College London, UK.
- Mills, J. E. S., & Hamilton, B. W. (1997). *Urban economics* (5th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Noviyanti, D., Pravitasari, A. E., & Sahara, S. (2020). Analisis perkembangan wilayah Provinsi Jawa Barat untuk arahan pembangunan berbasis wilayah pengembangan. *Jurnal Geografi*, 12(01).
- Pamudji, S. (1985). *Kerjasama antar daerah dalam rangka pembinaan wilayah: Suatu tinjauan dari segi administrasi negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Panjawa, J. L., Sugiharti, R. R., Prakoso, J. A., & Rahayu, R. M. (2021). Pola spasial potensi sektor unggulan usaha mikro dan kecil di Kecamatan Patuk, Gunungkidul. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(3).
- Pratiwi, M. C. Y., & Kuncoro, M. (2016). Analisis pusat pertumbuhan dan autokorelasi spasial di Kalimantan: Studi empiris di 55 kabupaten/kota 2000–2012. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 16(2).
- Richardson, H. W. (1978). *Regional and urban economics*. London: Penguin Books.
- Rustiadi, et al. (2009). *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Saputra, Z., et al. (2015). Analisis keterkaitan regional kabupaten/kota dalam pembentukan klaster pengembangan ekonomi wilayah Provinsi Aceh (Pendekatan analisis spasial). *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2).
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi wilayah dan perkotaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sjafrizal. (2018). *Analisis ekonomi regional dan penerapannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Sukirno, S. (2007). *Ekonomi pembangunan: Proses, masalah, dan dasar kebijakan* (2nd ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Syaifuddin, R., Verliana, A. D., & Setyadi, S. (2022). Analisis ketimpangan pembangunan dan klasifikasi wilayah antar kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020. *Journal of Business and Economics Research*, 3(2).
- Tarigan, R. (2005). *Perencanaan pembangunan wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tarigan, R. (2014). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tobler, W. (1963). Geographical area and map projections. *Geographical Review*, 53(1), 59-73.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga* (Translated by H. Munandar, M.A.). Jakarta: Erlangga.
- Warsono, H. (2012). Forming process, pattern and the need for intergovernmental management in Indonesia. *International Journal of Administrative Science & Organization*, 19(2).
- Widodo, W. H., Imadudinna, A. H., & Hidayati, A. N. (2023). Kajian pola kesenjangan ekonomi wilayah di kawasan aglomerasi Malang Raya. *Jurnal Plano Buana*, 3(2).
- Yunianto, D. (2021). Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. *Journals of Economics and Business Mulawarman*.
- Zulha, O. A., & Santoso, E. B. (2013). Pola keterkaitan spasial kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan sektor unggulannya. *Jurnal Teknik Pomits*, 2(1).